

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Konflik politik merupakan sebuah fenomena yang sangat sering terjadi di dalam proses berdemokrasi<sup>1</sup>, bahkan dapat dikatakan bahwa konflik politik tidak bisa dilepaskan dari demokrasi. Negara yang memakai sistem demokrasi segala kebijakan diputuskan dengan suara terbanyak melalui berbagai proses perumusan dengan pertimbangan mendapatkan hasil yang terbaik. Perbedaan pendapat dan adu argumen terkait layak atau tidak layak suatu kebijakan untuk disahkan adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. Istilah konflik dalam politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, kerusuhan, anarkisme, dan kudeta. Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal.<sup>2</sup>

Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural<sup>3</sup> dan secara sosial.<sup>4</sup> Kemajemukan horizontal ini dapat

<sup>1</sup> Hidup berdemokrasi digambarkan sebagai kehidupan bernegara yang sangat bebas. Dalam artian bahwa semua orang bebas untuk berpendapat, bebas untuk menerima informasi, dan bebas untuk memilih. Rakyat adalah penguasa tertinggi dalam sistem demokrasi, artinya rakyat juga bebas untuk menentukan wakilnya dalam pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan konflik, demokrasi dapat dikatakan memiliki hubungan erat dengan konflik, sebab dalam berdemokrasi perbedaan pendapat merupakan salah satu pemicu utama timbulnya sebuah konflik. ( rujuk Aspinall,Edward. Mietzner,Marcus. 2019. Paradox Demokrasi di Indonesia : Pemilihan Kompetitif di tengah-tengah Meningkatnya Liberalisme. *Buletin Studi Ekonomi Indonesia*. 55(3). 74 )

<sup>2</sup> Suripto. 2016. Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik. *Politikologi*. 3(1).82.

<sup>3</sup> Kemajemukan horizontal masyarakat secara kultural artinya perbedaan berdasarkan suku, ras, agama, dan daerah asal. Kemajemukan kultural dapat menyebabkan konflik karena masing-masing unsur akan saling mempertahankan identitas masing-masing dari ancaman kultur lainnya. Apalagi saat ini pertukaran informasi sudah sangat cepat sehingga untuk proses akulturasi dari budaya lain juga akan sangat cepat. Oleh sebab itu proteksi dari masing-masing identitas akan dilakukan agar budaya awalnya tidak hilang atau pudar. (Didiharyono, D, & Qur'ani, B. 2019. Increasing Community Knowledge Through the Literacy Movement. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(1). 17-24.)

menimbulkan konflik karena masing-masing unsur akan saling mempertahankan identitas dan karakteristik masing-masing dari ancaman kultur lainnya. Kemajemukan vertikal adalah perbedaan struktur masyarakat berdasarkan status sosial seperti kekayaan, pengetahuan, dan kekayaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik karena sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki status sosial yang tinggi akan memiliki kepentingan yang berbeda dengan masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi. Perbedaan kepentingan ini yang nantinya menimbulkan bentrokan di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari dua penjelasan penyebab konflik di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut terkait penyebab konflik politik, motif, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Pertama, dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik (kubu) yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian konflik di sini merujuk kepada hubungan antar kekuatan politik (kelompok/kubu dan individu yang memiliki jaringan dalam struktur kekuasaan) yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif di antara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok skala besar, maupun kecil. Perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukkan motif

---

<sup>4</sup> Kemajemukan secara sosial adalah perbedaan berdasarkan bidang pekerjaan, profesi, dan karakteristik tempat tinggal. Kemajemukan secara sosial dapat menyebabkan konflik karena masing-masing kelompok yang berdasarkan pada profesi, pekerjaan dan tempat tinggal tersebut memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda bahkan saling bertentangan. (*Ibid*)

<sup>5</sup> Mudzakkar NB. 2020. Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik : Suatu Tinjauan Teoritis. *JEMMA*. 3(2). 186.

mereka berkonflik. Motivasi seseorang atau kelompok untuk merebut kekuasaan selain dia ingin berkuasa, mereka juga ingin menguasai sumber daya ekonomi.

Aktor yang terlibat dalam konflik politik biasanya adalah antara elit politik dengan masyarakat ataupun elit politik dengan elit politik yang lainnya. Konflik politik juga dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif ialah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti: partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers dan forum-forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya, konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non konstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.<sup>6</sup>

Ada sebuah ulasan yang menarik terkait proses terselenggaranya pemilu legislatif di Indonesia. Pemilu legislatif merupakan kontestasi pemilihan wakil rakyat yang akan bertugas dan memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kekuasaannya selama 1 periode atau 5 tahun masa jabatan. Lembaga pemangku kekuasaan legislatif di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas di pusat pemerintahan negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas di

---

<sup>6</sup> Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana. 49.

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kekuasaan legislatif memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah, sebab lembaga legislatif memiliki 3 tugas pokok, yaitu : (1) fungsi legislasi<sup>7</sup>, (2) fungsi pengawasan<sup>8</sup>, (3) fungsi anggaran.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga legislatif sering bergesekan dengan lembaga eksekutif. Pergesekan ini sering kali terjadi pada fungsi legislatif yang ketiga yaitu fungsi anggaran. Pada prosesnya perancangan anggaran memang dilakukan oleh eksekutif, namun legislatif juga mempunyai peranan dan ikut andil dalam pengesahan rancangan anggaran tersebut. Pergesekan antara legislatif dan eksekutif ini terjadi pada proses pengesahan rancangan anggaran, ketika rancangan anggaran yang sudah disusun oleh eksekutif tidak langsung disahkan oleh legislatif. Seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, konflik terjadi antara Gubernur (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

---

<sup>7</sup> Fungsi legislasi adalah fungsi utama dari badan legislatif yaitu tugas di bidang peraturan dan undang-undang, baik itu membuat atau mengamandemen undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan mengakomodir semua aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam undang-undang yang dihasilkan. (lihat tulisan Jimly Asshiddiqie. 2000. *Menuju Struktur Parlemen Dua Kamar Kapita Selekta Teori Hukum*. Jakarta: FH UI.)

<sup>8</sup> Fungsi pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan yang penting dari lembaga legislatif adalah mengangkat dan memberhentikan kabinet, pengawasan terhadap pelaksanaan UUD dan UU, penentuan dan pengawasan anggaran dan keuangan Negara, melindungi hak milik dan kekayaan warga masyarakat dari pembebanan oleh Negara, menyelenggarakan debat publik mengenai kebijakan pemerintah, menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat, serta meminta pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan. (*Ibid*)

<sup>9</sup> Fungsi anggaran, Parlemen yang merupakan badan perwakilan rakyat, maka sudah seharusnya badan ini berwenang menentukan pemasukan dan pengeluaran uang negara yang pada hakekatnya adalah uang rakyat. Baik pembelanjaan negara yang diambil dari pajak sebagai sumbernya, maupun yang berasal dari pinjaman luar negeri, semuanya tentulah menjadi beban rakyat. Dalam kenyataannya memang badan eksekutiflah yang mengajukan rancangan pemasukan dan pengeluaran, namun parlemen tetap mempunyai kewenangan untuk merevisi atau mengubahnya. Setidak-tidaknya parlemen memberikan pengesahan terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh badan eksekutif. Kesemuanya itu merupakan fungsi keuangan badan legislatif. (*Ibid*)

Konflik ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, perbedaan pendapat ini terjadi karena beberapa kalangan anggota legislatif menganggap Gubernur menyalahi prosedur pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini Gubernur langsung minta pengesahan anggaran dari Kementrian Dalam Negeri tanpa dibahas ulang dengan lembaga legislatif.<sup>10</sup>

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bulukumba, konflik antara legislatif dengan eksekutif terjadi dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Konflik ini terjadi karena adanya hubungan personal yang tidak baik antara pemangku kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam hal ini Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, sehingga menyebabkan tertundanya pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah selama beberapa waktu.<sup>11</sup>

Konflik politik bukan hanya terjadi antara legislatif dan eksekutif, namun juga terjadi antar internal legislatif. Dalam hal ini aktornya adalah para fraksi partai yang duduk di lembaga legislatif. Seperti yang terjadi di Kota Surakarta tahun 2016 pada rapat perancangan peraturan daerah tentang minuman keras.

---

<sup>10</sup> Nirida, Syarifah A 2016. Analisis Konflik Antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. *Skripsi*. Departemen Politik dan Pemerintahan. Universitas Diponegoro.

<sup>11</sup> Syahrini, DKK. 2014. Konflik Dalam Komunikasi Politik Antara Legislatif dan Eksekutif Dalam Menyikapi Rencana RTRW di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 3(4). 264-269.

Pada kasus ini tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terbelah menjadi dua antara pihak yang setuju dengan pihak yang tidak setuju.<sup>12</sup>

Anastacia Patricia Novlina Nurak dan Sri Budi Eko Wardani juga menulis tentang konflik politik yang mengemukakan bahwa konflik kepentingan terjadi karena adanya keterbatasan posisi atau kekuasaan atau sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak pemerintahan, dalam hal ini yaitu eksekutif dan legislatif. Masing-masing kubu selalu mementingkan kepentingan masing-masing, padahal seharusnya kedua kubu tersebut berjalan seiringan agar roda pemerintahan berjalan seimbang.

Kekuasaan eksekutif dan legislatif di tingkat lokal diharapkan menjalankan fungsi masing-masing dengan baik dan saling bersinergi untuk menciptakan keseimbangan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat yang berdaulat. Namun juga tidak jarang ditemui kasus pergesekan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif pada tingkat lokal. Pergesekan terjadi apabila salah satu pihak penguasa lebih dominan dalam prosesnya. Konflik politik tentunya akan berdampak pada proses pelayanan publik yang merugikan kepentingan masyarakat dan juga nantinya konflik pada kaum elit politik juga akan berpotensi menghadirkan konflik horizontal dalam tubuh masyarakat, yang mana nantinya akan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian terkait konflik politik di Indonesia menjadi objek yang sangat menarik untuk diteliti, sebab konflik politik merupakan sebuah hal yang akan

---

<sup>12</sup> Febrianto, Wahyu SW. 2016. Analisis Formulasi Kebijakan Publik (Konflik antar Fraksi di DPRD dalam Kasus Penolakan Raperda Kota Surakarta tentang Minuman Keras). *Skripsi*. Departemen Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sebelas Maret.

<sup>13</sup> Dean, Pruitt G. dan Rubin Z. Jeffrey. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

terus terjadi selama proses bernegara berlangsung. Penelitian tentang konflik politik di Indonesia juga sudah sangat banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya adalah Syarifah Nirda Azilla<sup>14</sup> yang menulis tentang konflik antara Gubernur dengan DPRD DKI Jakarta dalam penetapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Ayatullah Hadi<sup>15</sup> menulis tentang konflik kepentingan pasca *Recall* terhadap Arif Usman anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara yang mengakibatkan konflik internal dalam Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara dan terganggunya jalannya kebijakan internal DPRD Kabupaten Lombok Utara. Lili Romli<sup>16</sup> menulis tentang konflik politik internal partai politik disebabkan oleh lemahnya pelembagaan partai sehingga menimbulkan koalisi dan oposisi di dalam tubuh partai. Anastacia Patricia Novlina Nurak dan Sri Budi Eko Wardani<sup>17</sup> juga menulis tentang konflik kepentingan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Sikka dalam perencanaan APBD Kabupaten Sikka tahun 2019.

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai konflik politik bukan hanya itu saja, masih ada tulisan dari Wahyu Febrianto<sup>18</sup> yang menjelaskan konflik antar fraksi di dalam lembaga DPRD Kota Surakarta saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surakarta tentang minuman keras.

---

<sup>14</sup> Nirda, Syarifah A 2016. *Analisis Konflik Antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015*. Skripsi. Departemen Politik dan Pemerintahan. Universitas Diponegoro.

<sup>15</sup> Hadi, Ayatullah dkk. 2020. Konflik Kepentingan Pasca Recall Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik. *Journal of Government and Politics*. 2(1). 57-72.

<sup>16</sup> Romli, Lili. 2017. Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi. *Politica*. 8(2). 95-118.

<sup>17</sup> Anastacia Patricia Novlina Nurak, Sri Budi Eko Wardani. 2021. Konflik Kepentingan Antara Pimpinan Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*. 3(1). 1-9.

<sup>18</sup> Febrianto, Wahyu SW. 2016. *Analisis Formulasi Kebijakan Publik (Konflik antar Fraksi di DPRD dalam Kasus Penolakan Raperda Kota Surakarta tentang Minuman Keras)*. Skripsi

Syahrani<sup>19</sup> menulis tentang konflik dalam komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif Kabupaten Bulukumba dalam menyikapi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi organisasi formal dan komunikasi informal. Suripto<sup>20</sup> menulis mengenai analisis penyelesaian sengketa atau konflik politik yang berkesimpulan bahwa konflik politik dapat terselesaikan dengan baik apabila sebab-sebab konflik politik sudah diketahui. Kemudian Mudzakkar NB<sup>21</sup> membahas mengenai cara manajemen konflik dalam upaya penyelesaian konflik politik. Serta Usman dan Cut Megawati<sup>22</sup> membahas tentang dinamika politik yang terjadi di Aceh Besar pasca perdamaian atas konflik politik. Kemudian Ansar Suherman<sup>23</sup> juga membahas mengenai penyelesaian konflik antar lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Buton Selatan dalam menyikapi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dapat diselesaikan melalui proses komunikasi politik formal dan komunikasi informal.

Sebanyak sepuluh karya ilmiah yang membahas mengenai konflik politik yang bisa dijadikan bahan acuan untuk penelitian kali ini, namun sayangnya tidak banyak penjelasan yang diberikan terkait konflik politik dalam tubuh lembaga parlemen. Walaupun parlemen adalah lembaga yang bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> Syahrani,dkk. 2014. Konflik Dalam Komunikasi Politik Antara Legislatif dan Eksekutif Dalam Menyikapi Rencana RTRW di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 3(4). 264-269.

<sup>20</sup> Suripto. 2016. Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik. *POLITIKOLOGI*. 3(1). 81-88

<sup>21</sup> NB, Mudzakkar. 2020. Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik : Suatu Tinjauan Teoritis. *JEMMA*. 3(2). 194-202.

<sup>22</sup> Usman, Cut Megawati. 2017. Dinamika Politik : Solusi Akhir Eksistensi Konflik dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Pasca Perdamaian di Aceh Besar. *Jurnal Humaniora*. 1(2). 79-86.

<sup>23</sup> Suherman, Ansar. 2016. Konflik Dalam Komunikasi Politik Antara Legislatif dan Eksekutif Dalam Menyikapi Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Studi Kepemerintahan*. 1(2). 10-15.

menyederhanakan konflik dalam masyarakat, namun pada fenomena kali ini malah parlemen itu sendiri yang terlibat konflik. Konflik mesti bersifat melembaga dan dapat berujung pada terwujudnya konsensus antara berbagai kepentingan. Hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengapa konflik di parlemen justru berubah menjadi konflik kekerasan fisik yang bersifat anarkis. Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dalam kajian tentang konflik internal pada tubuh parlemen.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dinamika politik di dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Solok telah terjadi disharmonisasi hubungan antara Bupati dengan Wakil Bupati serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (DPRD) periode 2019-2024. Pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2019 pada tanggal 26 April 2021, hubungan baik antara Bupati Solok dengan Wakil Bupati Solok hanya berlangsung selama 3 bulan. Dalam sebuah wawancara bersama banuanews.com Wakil Bupati Solok menyebutkan bahwa setelah 3 bulan pasca pelantikan, tidak ada lagi komunikasi antara Bupati dengan Wakil Bupati Solok dalam segala bidang termasuk dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok. Selama pemerintahan Kabupaten Solok periode 2019-2024 berlangsung sampai ulang tahun Kabupaten Solok tahun 2021, Wakil Bupati tidak ikut terlibat hampir diseluruh agenda pemerintahan Kabupaten Solok.<sup>24</sup>

Disharmonisasi tidak hanya terjadi antara Bupati Solok dengan wakilnya, tetapi disharmonisasi juga terjadi antara Bupati Solok dengan Ketua DPRD.

<sup>24</sup><https://banuanews.com/hubungan-bupati-solok-dan-wakil-bupati-serta-ketua-dprd-kian-memas/>. Diakses pada tanggal 15 februari 2023 pukul 20.20

Hubungan tidak baik antara Bupati Solok dengan Ketua DPRD Kabupaten Solok tidak hanya terjadi dalam ranah pemerintahan saja, namun juga masuk ke dalam ranah pribadi. Bupati Solok terbukti dengan sengaja menyebarkan sebuah video ke dalam sebuah grup *whatsapp* yang dimaksudkan untuk menyerang pribadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, bahkan lebih parahnya lagi video tersebut sampai tersebar ke publik di luar anggota grup *whatsapp* tersebut. Atas tindakan kurang terpuji tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Solok mengambil tindakan untuk melaporkan Bupati Solok kepada pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.<sup>25</sup>

Permasalahan dalam dinamika politik di Kabupaten Solok tidak hanya terjadi dalam ranah personal saja, namun polemik yang terjadi sudah masuk ke dalam ranah kelembagaan yaitu antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam tubuh lembaga legislatif pemerintah daerah Kabupaten Solok terjadi dualisme kepemimpinan. Dualisme yang terjadi melibatkan pihak Ketua DPRD yaitu Dodi Hendra beserta pengikutnya dengan wakilnya Ivoni Munir beserta pengikutnya. Dualisme kepemimpinan ini diawali dengan mosi tidak percaya dari 22 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok terhadap kepemimpinan Dodi Hendra. Mosi tidak percaya terhadap Dodi Hendra hadir atas

---

<sup>25</sup>[https://regional.kompas.com/read/2021/09/04/193200578/perseteraan-bupati-dan-ketua-dprd-solok-dodi-hendra-pintu-damai-sudah?page=all&jxconn=1\\*17lhyf3\\*other\\_jxampid\\*a09CM1c3NGVidIRFd0JvNnJkdC1TZTNQcnZtcWpFM2hPQIRtLXBWZy1YbXJjRmF4d09UREY0YW82QIFQVknKcA..#page2](https://regional.kompas.com/read/2021/09/04/193200578/perseteraan-bupati-dan-ketua-dprd-solok-dodi-hendra-pintu-damai-sudah?page=all&jxconn=1*17lhyf3*other_jxampid*a09CM1c3NGVidIRFd0JvNnJkdC1TZTNQcnZtcWpFM2hPQIRtLXBWZy1YbXJjRmF4d09UREY0YW82QIFQVknKcA..#page2). Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 20.30

dasar kepemimpinan Dodi Hendra dianggap arogan dan otoriter serta mengabaikan prinsip kolektif kolegial.<sup>26</sup>

Mosi tidak percaya dan dualisme kepemimpinan ini berimbas pada agenda yang akan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 merupakan agenda yang harus dirampungkan oleh pemerintah daerah pada awal masa pemerintahannya untuk lima tahun kedepan. Rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 dilaksanakan di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dan dengan dua pimpinan rapat yang berbeda. Rapat yang dipimpin oleh Dodi Hendra selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok di kawasan Arosuka. Kemudian rapat yang dipimpin oleh Ivoni Munir dilaksanakan di kawasan wisata Cinangkiek.

Terjadinya dua rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 dalam waktu yang bersamaan disebabkan oleh adanya Surat Perintah Tugas atau SPT yang ditandatangani oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Surat perintah tugas tersebut berisikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 dapat disahkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok. Artinya berdasarkan surat perintah tugas tersebut,

<sup>26</sup> <https://radarsumbar.com/aneh-dua-kubu-dprd-kabupaten-solok-bahas-rpjmd-di-tempat-berbeda/>.

Diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 22.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 dapat dirampungkan tanpa harus melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Kedua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok ini saling mengklaim bahwa rapat yang mereka adakan adalah rapat yang sah. Bahkan pada rapat yang dipimpin oleh Dodi Hendra terjadi keriuhan yang nyaris baku hantam antar anggota DPRD Kabupaten Solok. Keriuhan ini dipicu oleh banyaknya interupsi yang dilayangkan oleh anggota DPRD Kabupaten Solok yang hadir pada saat itu, padahal rapat pembahasan baru saja dimulai. Keriuhan ini juga dipicu oleh mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada Dodi Hendra masih berjalan. Keriuhan yang terjadi mengakibatkan rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 diskors selama beberapa waktu. Sedangkan di tempat yang berbeda Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Ivoni Munir beserta anggota lain yang menghadiri rapat bersamanya telah merampungkan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021. Ivoni Munir juga mengklaim bahwa rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 yang dipimpin olehnya merupakan rapat yang sah, karena beliau memiliki pegangan yaitu Surat Perintah Tugas atau SPT tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok dapat disahkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Solok, dalam hal ini yaitu Ivoni Munir. <sup>27</sup>

---

<sup>27</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/4635313/nyaris-baku-hantam-saat-sidang-paripurna-begini-penjelasan-ketua-dprd-solok>. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 01.18 WIB.



**Gambar 1. 1 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang ricuh**

Rapat yang dipimpin oleh Ivoni Munir yang dilaksanakan di kawasan wisata Cinangkiek juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan sedikit kontroversial. Keadaan ini muncul karena kawasan Cinangkiek merupakan kepemilikan pribadi Bupati Solok, oleh karena itu Bupati Solok dianggap memiliki peran dalam dualisme kepemimpinan yang terjadi di dalam tubuh DPRD Kabupaten Solok dan dianggap memihak kepada Ivoni Munir. Bupati Solok dianggap dengan sengaja memfasilitasi rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 yang dipimpin oleh Ivoni Munir. Terkait dengan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021, pada akhirnya pemerintah Kabupaten Solok menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditandatangani oleh Ivoni Munir sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 yang sah. Dodi Hendra selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten juga tidak ada melakukan gugatan dan rapat lanjutan terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpinnya. Dodi Hendra pada tahap selanjutnya hanya akan menyerahkan

keputusan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri.

Permasalahan didalam tubuh pemerintahan Kabupaten Solok tidak hanya sampai di bagian itu saja. Pasca Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2021 disahkan, Badan Musyawarah Kabupaten Solok mengadakan rapat dengan agenda menindaklanjuti mosi tidak percaya dari anggota DPRD Kabupaten Solok terhadap Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024. Badan Musyawarah Kabupaten Solok juga menindaklanjuti laporan usulan pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok. Hasilnya adalah Badan Musyawarah menyepakati untuk mencopot Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok atas dasar pelanggaran kode etik. Kemudian badan Musyawarah juga menunjuk salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yaitu Lucky Effendi sebagai Pelaksana Tugas atau PLT Ketua. Dodi Hendra resmi dicopot dari jabatannya tertanggal 30 Agustus 2021 dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor : 189-18-2021.<sup>28</sup>

Konflik politik yang terjadi di Kabupaten Solok tidak berhenti sampai pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok saja. Pasca pemberhentian, pihak Dodi Hendra dan partai Gerindra menilai keputusan yang diambil oleh Badan

<sup>28</sup><https://solokkab.go.id/hasil-rapat-paripurna-tetapkan-lucky-effendi--sebagai-plt-ketua-dprd-kabupaten-solok#:~:text=Hasil%20Rapat%20Paripurna%20Tetapkan%20Lucky%20Effendi%20sebagai%20Plt.%20Ketua%20DPRD%20Kabupaten%20Solok>. Diakses pada tanggal 16 februari 2023 pukul 21.00

Kehormatan DPRD Kabupaten Solok adalah keputusan yang cacat hukum. Pihak kuasa hukum Dodi Hendra menilai bahwa keputusan Badan Kehormatan tersebut tidak jelas dan cacat hukum karena menggabungkan dua objek perkara sekaligus, yaitu mosi tidak percaya dari 22 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dan pengaduan masyarakat. Kemudian pihak Dodi Hendra mengatakan bahwa keputusan resmi terkait pemberhentiannya dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Solok sepenuhnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat. Tertanggal 7 Desember 2021 Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 120/548/Pem-Otda-2021 yang menegaskan bahwa secara legal formal, Dodi Hendra adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yang sah. Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Dewan Pimpinan Daerah partai Gerindra selaku partai yang menaungi Dodi Hendra menuntut Bupati Solok dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok serta pihak yang terkait untuk taat dan patuh terhadap keputusan dari Gubernur Sumatera Barat tersebut. Dewan Pimpinan Daerah partai Gerindra juga meminta seluruh keputusan yang dibuat oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Solok terkait pencopotan jabatan Dodi Hendra dicabut, serta mencabut keputusan Pelaksana Tugas atau PLT yang diberikan kepada Lucky Effendi agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.<sup>29</sup>

Dalam kondisi seperti ini konflik selalu timbul dan kadang-kadang merusak. Tidak ada mekanisme kelembagaan dan dasar konstitusi yang dapat digunakan untuk menuntaskan penyelesaian konflik seperti ini. Karena itu

---

<sup>29</sup> <https://jurnalsumbar.com/2022/01/gerindra-sumbar-minta-bupati-epyardi-asda-dan-dprd-solok-pulihkan-nama-baik-dodi-hendra/>. Diakses pada tanggal 23 februari 2023 pukul 19.00

menarik untuk diteliti bagaimana dilema kepemimpinan pada tubuh DPRD Kabupaten Solok dalam mengemban tugas konstitusionalnya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, namun di saat yang sama kedua pihak memiliki perbedaan partai politik, posisi kelembagaan, dukungan kewenangan kelembagaan dan legitimasi publik.<sup>30</sup>

Pentingnya kajian tentang konflik politik antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem otonomi daerah, karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan mitra kerja yang mesti sejalan dan searah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gejala politik berupa konflik politik yang sudah dipaparkan di atas mirip dengan apa yang disampaikan oleh Maurice Duverger yang peneliti kutip dalam jurnal Irwandi dan Endah<sup>31</sup>, terdapat 2 penyebab konflik politik, yaitu (1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. (2) Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota

<sup>30</sup> Fisher, Simon. dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Penyunting S.N. Kartikasari. Zed Books dan The British Council. London. 72.

<sup>31</sup> Irwandi dan Endah R. Chotim. 2017. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO*. 7(2): 24-42.

kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.

Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa konflik yang melibatkan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok ini dipicu oleh sebab-sebab individual dan sebab-sebab kolektif. Hubungan yang tidak harmonis antar personal pejabat pemerintah Kabupaten Solok menjadi dasar utama konflik politik di Kabupaten Solok tahun 2021. Titik awal konflik politik di Kabupaten Solok adalah sejak adanya penyebaran video bernarasikan ujaran kebencian terhadap Dodi Hendra oleh Bupati Solok via grup *Whatsapp*. Kejadian ini sampai ke pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk menyelesaikannya. Pasca penyebaran video tersebut, pihak yang bersimpati dan menyatakan dukungan terhadap Dodi Hendra adalah rekan satu partai beliau yaitu Jon Firman Pandu yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Bupati Solok. Akibat dukungan Jon Firman Pandu terhadap Dodi Hendra adalah Bupati tidak pernah melibatkan lagi wakilnya dalam segala bentuk urusa pemerintahan di Kabupaten Solok.

Gaya kepemimpinan otoriter Dodi Hendra selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yang tidak disukai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok lainnya. Dodi Hendra juga dianggap kurang disiplin sehingga ia dikatakan tidak layak memimpin sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Hal ini menyebabkan adanya dualisme didalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Dualisme ini mengakibatkan tubuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok terbagi menjadi dua yaitu pihak pertama yang tidak mendukung

Dodi Hendra dan pihak kedua yang mendukung penuh kepemimpinan Dodi Hendra. Kemudian konflik ini memuncak setelah adanya mosi tidak percaya terhadap Dodi Hendra oleh pihak yang tidak mendukung kepemimpinan Dodi Hendra. Dengan memperhatikan dinamika yang berkembang dan interaksi antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, sebagaimana terurai di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Konflik Politik Internal DPRD Kabupaten Solok Dalam Rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021”

Berdasarkan beberapa penjelasan dari latar belakang di atas menarik peneliti untuk menjadikan ini pembahasan ini sebagai kajian penelitian. Berdasarkan permasalahan penelitian di atas kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik politik antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Solok tahun 2021?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik politik antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Solok tahun 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan kronologi konflik politik antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Solok tahun 2021.
- b. Menganalisis penyebab terjadinya konflik politik antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Solok tahun 2021.

- c. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh konflik politik antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Solok tahun 2021.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Akademis

- a. Menambah khasanah ilmu politik khususnya mengenai konflik politik antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok khususnya dalam memahami konflik politik dalam penetapan kebijakan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan konflik antara Pemerintah Kabupaten Solok. Penelitian ini juga diharapkan penelitian ini dijadikan proses pembelajaran guna menambah serta mengembangkan wawasan, pengalaman serta pengetahuan dalam memahami ilmu politik beserta gejala-gejalanya yang ada di lapangan.